

**BAB I**

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan organisasi yang melaksanakan program strategis pada urusan wajib Pekerjaan Umum dan Perumahan serta urusan pilihan Pertanahan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari Sekretariat, 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Perumahan dan Permukiman, Bidang Cipta Karya, Bidang Pertanahan dan Pemakaman serta 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Program strategis dinas yang dilaksanakan terkait dengan pencapaian target program nasional yaitu dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur kota dan lingkungan permukiman serta pencapaian *Universal Access* 100–0–100 (100% Pemenuhan akses layanan air bersih, 0% kawasan kumuh, 100% akses sanitasi layak). Selain pemenuhan target tersebut, pelaksanaan program berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu pemenuhan perumahan layak huni, pelayanan pemakaman cina dan kristen serta pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja.

Capaian kinerja dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Batu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu mempunyai **tugas** melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- f. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

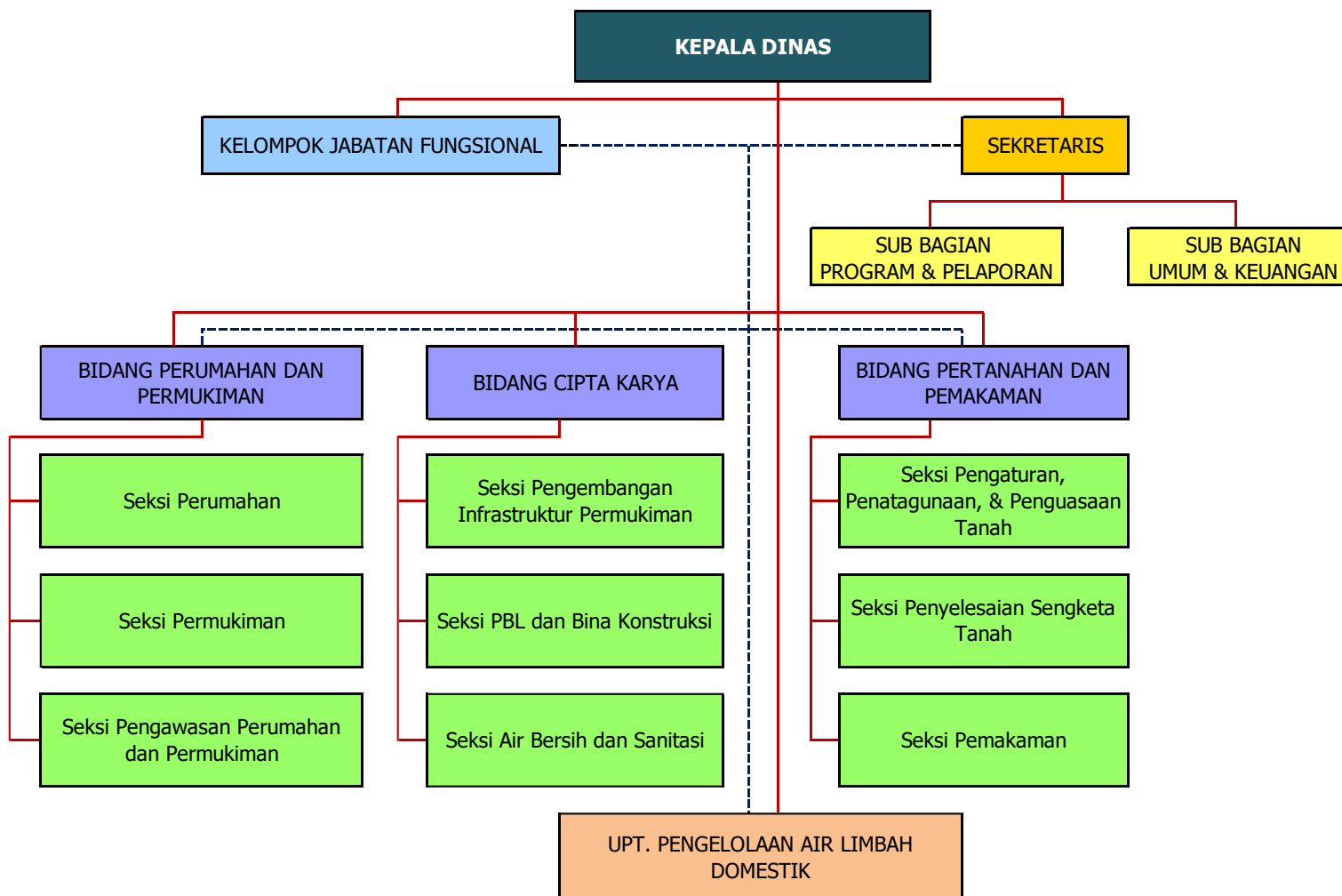
1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Permukiman;
 3. Seksi Pengawasan Perumahan dan Permukiman.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
 2. Seksi Penataan Bangunan Lingkungan dan Bina Konstruksi; dan
 3. Seksi Air Bersih dan Sanitasi.
- e. Bidang Pertanahan dan Pemakaman, membawahi :
 1. Seksi Pengaturan, penatagunaan, dan penguasaan Tanah;
 2. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah; dan
 3. Seksi Pemakaman.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Gambaran struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan sebagaimana gambar berikut.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Gambar 1. Struktur Organisasi

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****1.1. Visi dan Misi Organisasi**

Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu, berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2017-2022 dengan Visi “***Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera***”, untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Misi 1.** Meningkatkan stabilitas sosial, politik dan kehidupan masyarakat yang harmonis, demokratis, religius dan berbudaya berbasis nilai-nilai kearifan lokal;
- Misi 2.** Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia seutuhnya melalui aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan;
- Misi 3.** Mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri dan berwawasan lingkungan berbasis pada potensi unggulan;
- Misi 4.** Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan
- Misi 5.** Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional

Dengan mempedomani tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu menetapkan **tujuan** yaitu:

” Meningkatkan akses dan fasilitas masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak ”

1.2. Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Sasaran

1.2.1. Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu didasari oleh target capaian pelayanan yang meliputi antara lain :

- Meningkatkan akses perumahan yang layak untuk masyarakat;
- Meningkatkan infrastruktur kota dan kawasan permukiman yang layak;
- Meningkatkan penatagunaan tanah dan sarana prasarana pemakaman.

1.2.2. Indikator Kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengampu urusan Bidang Perumahan, berdasar urusan yang diampu dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengampu sasaran RPJMD pada **Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan** dengan indikator kinerja tujuan berikut:

NO	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi awal RPJMD (2017)	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD (2022)
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks kualitas permukiman	80	85	85	85	85	85	85

Unsur pembangunan dari pencapaian Indikator kinerja ini merupakan komposit dari beberapa indikator sasaran yang mendukung tercapainya kualitas permukiman yang baik dan diharapkan dapat berkelanjutan sebagaimana sasaran strategis dalam pembangunan infrastruktur.

Indikator sasaran yang menjadi unsur pendukung yang masuk dalam perhitungan indeks kualitas permukiman adalah sebagaimana berikut:

a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni,

Indikator ini terbangun dari keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH) yang menjadi misi target penyelesaian salah satu permasalahan kemiskinan dari segi infrastruktur fisik. Cakupan ketersediaan dihitung berdasarkan jumlah bangunan rumah yang layak huni dibagi jumlah seluruh rumah. Jumlah rumah tidak layak huni yang terdata pada tahun 2017 sejumlah 546 rumah, pada tahun 2018 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan validasi dan verifikasi pembangunan Rumah tidak layak huni (bedah rumah) sejumlah 150 rumah (data bedah rumah tidak layak huni terlampir). Kegiatan bedah rumah tidak layak huni di Kota Batu tidak hanya dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, akan tetapi juga merupakan kegiatan yang dilaksanakan desa dan atau kelurahan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Pengurangan pada jumlah rumah tidak layak huni ini berdampak pada jumlah rumah layak huni pada tahun 2018 yaitu pengurangan sejumlah 332 rumah. Capaian cakupan rumah layak huni sebesar 99,44% dihasilkan dari perhitungan 58.964 rumah layak huni dibagi jumlah seluruh rumah se-Kota Batu sejumlah 59.296 rumah dikali 100%. Unsur cakupan ini berperan sebesar 20% dari nilai indeks.

b. Persentase Penduduk berakses air bersih,

Sebagaimana target *Universal Access* 100 – 0 – 100 sebagai target nasional yang harus dicapai dalam pembangunan infrastruktur dasar, akses air bersih menjadi target wajib yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Target ini juga merupakan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pencapaian target ini dihitung berdasarkan jumlah Sambungan Rumah yang terlayani/tersambung dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dikonversikan pada jumlah jiwa yang mendapatkan akses pelayanan. Data akses layanan air bersih yang tercatat pada tahun 2017 sebesar 179.421 jiwa (82% dari jumlah penduduk). Pada tahun 2018, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan kegiatan peningkatan

dan atau pengembangan/perluasan jaringan perpipaan air bersih pedesaan (berupa pembangunan bronchaptering, tandon dan meterisasi sebagaimana data terlampir) yang berdampak pada peningkatan akses penduduk atas air bersih sejumlah 750 jiwa. Capaian persentase penduduk berakses air bersih pada tahun 2018 sebesar 81,2% didapatkan dari capaian 2017 (179.421 jiwa) ditambah peningkatan akses 2018 (750 jiwa) dibagi jumlah penduduk tahun 2018 (221.894 jiwa) dikali 100%. Besaran capaian ini menurun dari tahun sebelumnya karena peningkatan akses yang dilaksanakan tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk. Persentase akses air bersih ini berkontribusi 10% dari nilai indeks.

c. Persentase Rumah tinggal bersanitasi,

Indikator sasaran ini juga salah satu target nasional *Universal Access* 100 – 0 – 100 dan SPM. Pencapaian target dihitung berdasarkan jumlah rumah tinggal dengan akses sanitasi khususnya air limbah yang layak dibandingkan dengan seluruh rumah tinggal. Data capaian persentase akses sanitasi/air limbah layak pada tahun 2017 tercapai sejumlah 50.496 rumah (85,16%). Peningkatan akses sanitasi ini selain diupayakan melalui pembangunan IPAL Komunal yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan juga upaya pemicuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pada tahun 2018, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan kegiatan Pembangunan IPAL Komunal sejumlah 10 (sepuluh) IPAL komunal masing-masing melayani 50 sambungan rumah yang dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat sebagaimana Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat. Persentase rumah tinggal yang bersanitasi tahun 2018 sebesar 86% diperoleh dari data capaian 2017 (50.496 rumah) ditambahkan rumah yang tersambung IPAL Komunal yang terbangun (500 rumah) dibagi jumlah seluruh rumah (59.296 rumah). Akses sanitasi/air limbah ini berkontribusi 20% dari nilai indeks.

d. Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik,

Jalan lingkungan permukiman merupakan salah satu infrastruktur/sarana prasarana lingkungan permukiman yang berdampak pada kelancaran kegiatan mobilisasi dalam lingkungan permukiman. Capaian presentase jalan lingkungan permukiman pada tahun 2018 sebesar 79,19% dihitung

berdasarkan panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2017 sebesar 85.327 meter ditambah dengan panjang jalan lingkungan yang dibangun pada tahun 2018 sebesar 27.292,3 meter (data terlampir) dibagi panjang jalan lingkungan permukiman dikali 100%. Indikator ini berkontribusi 20% dari nilai indeks.

- e. Presentase bangunan gedung negara yang sesuai persyaratan teknis, Indikator ini berkaitan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur kota dan atau kawasan permukiman yang ditangani Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan. Kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan pembangunan gedung kantor, rehabilitasi rumah dinas maupun pembangunan infrastruktur kota dan infrastruktur pendukung pada kawasan permukiman. Pada tahun 2018, terdapat 7 (tujuh) pembangunan dan rehab gedung/rumah dinas (data terlampir). Persentase bangunan gedung negara sebesar 84,3% didapatkan dari perhitungan 95 bangunan layak pada tahun 2017 ditambah 7 bangunan baru dan rehab dibagi 121 bangunan yang menjadi kewenangan. Indikator ini berkontribusi 20% dari nilai indeks.
- f. Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak. Sarana dan prasarana pemakaman merupakan salah satu sarana dasar yang dibutuhkan pada setiap kawasan permukiman. Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak diperoleh dari jumlah pemakaman yang layak dibagi jumlah keseluruhan makam dikali 100%. Persentase pada tahun 2018 sebesar 19,77% diperoleh dari jumlah pemakaman yang dilakukan pembangunan sarana prasarananya pada tahun 2018 (terlampir) sejumlah 17 tempat pemakaman dibagi seluruh tempat pemakaman sejumlah 86 tempat pemakaman. Indikator ini berkontribusi 19% dari nilai indeks.

Perhitungan nilai indeks kualitas permukiman sebagai indikator kinerja utama untuk mencapai tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara singkat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan	Indikator	Capaian 2018
Indeks kualitas permukiman	Jumlah	(0,1x81,2)
	% air bersih x 0,1	+(0,2x86)
	% akses air limbah x 0,2	+(0,2x79,19)
	% Jalan lingkungan x 0,2	+(0,2x84,3)
	% gedung pemerintahan/negara x 0,2	+(0,2x99,44)
	% ketersediaan rumah layak huni x 0,2	+(0,1x19,77)
	% Pemakaman x 0,1	= 79.88 %

Capaian kinerja utama Dinas Perumahan Kawasan, untuk tahun 2018 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Sasaran Tahun Anggaran 2018

No	Kinerja Utama / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi
1	Meningkatnya akses perumahan yang layak untuk masyarakat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	99.11	99.44
2	Meningkatnya infrastruktur kota dan kawasan permukiman yang layak	Persentase penduduk berakses air bersih	84.49	81.20
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	86.96	86
		Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	80	79.19
		Persentase bangunan gedung negara yang sesuai persyaratan teknis	84	84.30
3	Meningkatnya penatagunaan tanah dan sarana prasarana pemakaman	Persentase fasilitasi sertifikasi tanah	100	100
		Persentase tempat pemakaman dengan sarana prasarana yang layak	10	19.77

1.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja yang diformulasikan dalam penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja juga merupakan ikhtisar dari rencana kinerja tahunan

yang akan dicapai dan disepakati oleh para pejabat disetiap instansi pemerintah.

Program / Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu yang dilaksanakan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Indikator Program (outcome) / Kegiatan (Output)
1	2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah biaya jasa komunikasi dan listrik yang terbayar
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	Jumlah servis kendaraan pajak kendaraan dan jasa KIR
penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honor pengelola keuangan, kegiatan dan honor non PNS
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honor petugas kebersihan kantor
penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan
penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan rumah tangga yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan Berlangganan yang sudah dibayar
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan luar daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
Pembangunan rumah dinas	Redesign rumah dinas LVRI
pembangunan gedung kantor	Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah belanja suku cadang, BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rehabilitasi rumah dinas

rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian olahraga
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat
Program Pengembangan Perumahan	
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	
Pengadaan dan pemasangan penomoran rumah dan bangunan	Jumlah nomor rumah dan bangunan terpasang
Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	
Persentase fasilitasi sertifikasi lahan	
Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah bidang tanah bersertifikat
Program pemberdayaan komunitas perumahan	
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	
Validasi rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni yang tervalidasi
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
Persentase sengketa tanah yang tertangani	
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah kasus sengketa tanah yang tertangani
Program pengembangan sistem informasi pertanahan	
Persentase database pertanahan	
Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Jumlah database aset tanah Kota Batu
Program pengelolaan areal pemakaman	
Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak	
Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal	Jumlah inventarisasi data makam bertribusi
koordinasi pengelolaan areal pemakaman	Jumlah masyarakat terlayani pengelolaan makam bertribusi
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah sarana dan prasarana pemakaman terbangun
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah tempat makam yang terpelihara/dalam kondisi baik
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase pelaksanaan monev tempat makam bertribusi
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
Persentase rumah tinggal bersanitasi	
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah IPAL Komunal terbangun

Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah	Jumlah peserta sosialisasi program LLTT
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PAL	Jumlah rumah/bangunan terdata dan terlayani sedot tinja
Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Prosentase infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik
Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun
Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Persentase penduduk berakses air minum
Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	Panjang jalan lingkungan yang terbangun
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan	Jumlah bangunan tandon jaringan transmisi dan meterisasi HIPAM
Program pembinaan lingkungan sosial	Persentase akses jalan lingkungan saluran air limbah dan air bersih di lingkungan perkotaan
Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan jalandddan/atau jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata	Panjang jalan lingkungan terbangun
penyediaan/ pemeliharaan saluran air limbah, samitasi dan air bersih	Jumlah Jaringan air bersih dan jumlah IPAL Komunal yang terbangun

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2018

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu tahun 2018 ini didasarkan kepada pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan sebelumnya sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu tahun 2018 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*) keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur rencana strategis mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan tahun anggaran 2018 dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan, keluaran, dan hasil. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya. Pengukuran terhadap kinerja kegiatan dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada Lampiran 2.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yaitu dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :

- a. Data Internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan kegiatan lainnya.
- b. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu.
- c. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu Tahun 2018, yaitu :
 - 1) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2018, indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan alokasi dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja dengan satuan rupiah.
 - 2) Indikator keluaran (*output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari satu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, dan jumlah barang atau jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satu kegiatan, orang paket, buah unit, rupiah dan sebagainya.

- 3) Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Output Kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%).

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing Indikator kinerja kegiatan, dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam (PKK) maupun (PPS) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi (sisa pagu anggaran) menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan Pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar di ketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

- a. $X \geq 0.9$: Baik
b. $0.75 X < 0.9$: Cukup

c. $0.55 \leq X < 0.75$: Sedang

d. $X < 0.55$: Kurang

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektifitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang di hasilkan oleh suatu input tertentu.

Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (Outcome).

2. Pencapaian Kinerja Sasaran, Kegiatan dan Indikator Makro

Pencapaian kinerja sasaran, kegiatan dan indikator, yaitu sebagai berikut :

a. Pengukuran pencapaian sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi dari Dinas.

b. Pengukuran kinerja kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengetahui / menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Dinas. Pengukuran kinerja kegiatan ini merupakan awal dari pengukuran kinerja instansi pemerintah.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu tahun 2018 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam.

Dalam analisis pencapaian kinerja diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang. Analisis terhadap hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dari pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2018.

Dalam Tahun 2018 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu menjalankan 12 Program dan 38 kegiatan, untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja pada masing-masing program dan kegiatan yang berasal dari seluruh sumber dana pada APBD Kota Batu, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Realisasi pelaksanaan program/kegiatan DPKPP tahun anggaran 2018 yang ada di setiap SKPD

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Ouput Kegiatan		Hasil/Outcome	Ket	
				Kualitatif	Kuantitatif			
					Target			Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94.250.000	75.702.240,00	18.547.760,91	Jumlah biaya jasa komunikasi dan listrik yang terbayar	1 tahun	1 tahun		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	43.295.100	21.109.243,00	22.185.857,00	Jumlah servis kendaraan pajak kendaraan dan jasa KIR	1 tahun	1 tahun		
penyediaan jasa adinistrasi keuangan	985.194.800	756.043.368,00	229.151.432,00	Jumlah honor pengelola keuangan, kegiatan dan honor non PNS	12 bln	12 bln		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.500.000	55.875.000,00	2.625.000,00	Jumlah honor petugas kebersihan kantor	36 org	36 org		
penyediaan alat tulis kantor	66.416.000	40.023.000,00	26.393.000,00	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	59 jenis	59 jenis		
penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.593.000	35.278.400,00	7.314.600,00	Jumlah jenis Cetak dan Penggandaan	3 jenis	3 jenis		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000	1.200.000,00	1.800.000,00	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	12 bulan	12 bulan		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.542.000	4.750.050,00	11.791.950,00	Jumlah jenis Peralatan rumah tangga yang disediakan	41 Jenis	41 Jenis		

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Ouput Kegiatan			Hasil/Outcome	Ket
				Kualitatif	Kuantitatif			
					Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.300.000	4.498.000,00	4.802.000,00	Jumlah Bahan bacaan Berlangganan yang sudah dibayar	720 exp	720 exp		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.507.600	37.163.850,00	6.343.750,00	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	8 jenis	8 jenis		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	150.000.000	107.638.370,00	42.361.630,00	Jumlah Perjalanan luar daerah	139 org	139 org		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	21.000.000	7.787.500,00	13.212.500,00	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	320 org	320 org		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					100%	100%	Meningkatnya Sarana Prasarana aparatur	
Pembangunan rumah dinas	50.000.000	48.840.000,000	1.160.000,00	Redesign rumah dinas LVRI	1 Dokumen	1 Dokumen		
pembangunan gedung kantor	971.564.009	108.636.000,00	862.928.009,00	Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun	3 bangunan	3 bangunan		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.160.000	1.097.600,00	1.062.400,00	Perlengkapan gedung kantor tersedia	12 bln	12 bln		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	407.112.000	109.714.900,00	297.397.100,00	Jumlah belanja suku cadang, BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas/operasional	12 bln	12 bln		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	87.494.880	24.176.500,00	63.318.380,00	Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	12 bln		
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	511.000.000	487.125.500,00	23.874.500,00	Jumlah rehabilitasi rumah dinas	2 rumah dinas	2 rumah dinas		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	806.620.800	750.381.800,00	56.239.000,00	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	2 pekerjaan	2 Pekerjaan		

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Ouput Kegiatan			Hasil/Outcome	Ket
				Kualitatif	Kuantitatif			
					Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					100%	100%		
Pengadaan pakaian kerja lapangan	30.000.000	24.156.000,00	5.844.000,00	Jumlah pakaian olahraga	75 stel	75 stel		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					100%	100%	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	82.150.000	7.215.000,00	74.935.000,00	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	25 orang	2 orang		

Tabel 3.2. Realisasi pelaksanaan program/kegiatan DPKPP tahun anggaran 2018 yang menjadi urusan pada SKPD

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Ouput Kegiatan			Hasil/Outcome	Ket
				Kualitatif	Kuantitatif			
					Target	Realisasi		
2	3	4	5	6	7	8	9	12
Program Pengembangan Perumahan					80.41%		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	
Pengadaan dan pemasangan penomoran rumah dan bangunan	19.150.000	10.053.832,00	9.096.668,00	Jumlah nomor rumah dan bangunan terpasang	13000 plat	0		
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					100%		Persentase fasilitasi sertifikasi lahan	
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.138.929.000	390.927.993,00	748.001.007,00	Jumlah bidang tanah bersertifikat	1384 bidang	277 bidang		
Program pemberdayaan komunitas perumahan					80.41%		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	
Validasi rumah tidak layak huni	36.095.000	16.279.800,00	19.815.200,00	Persentase rumah tidak layak huni yang tervalidasi	100%	100%		
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan					100%		Persentase sengketa tanah yang tertangani	
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	30.244.900	0	30.244.900,00	Jumlah kasus sengketa tanah yang tertangani	1 Kasus	0		

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Ouput Kegiatan			Hasil/Outcome	Ket
				Kualitatif	Kuantitatif			
					Target	Realisasi		
2	3	4	5	6	7	8	9	12
Program pengembangan sistem informasi pertanahan					100%		Persentase database pertanahan	
penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	106.459.842	102.768.700,00	3.961.142,00	Jumlah database aset tanah Kota Batu	1 Database	1 Database		
Program pengelolaan areal pemakaman					10%		Persentase pemakaman dengan sarana prasarana yang layak	
Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal	50.000.000	49.252.000,00	748.000,00	Jumlah inventarisasi data makam bertribusi	1 TPU	1 TPU		
koordinasi pengelolaan areal pemakaman	44.055.000	24.225.000,00	19.830.000,00	Jumlah masyarakat terlayani pengelolaan makam bertribusi	2500	1200		
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	3.326.045.050,00	3.027.303.150,00	298.741.900,00	Jumlah sarana dan prasarana pemakaman terbangun	17 lokasi	17 lokasi		
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	840.000.000	814.000.000,00	26.000.000,00	Insentif juru makam	140 orang	130 orang		

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Ouput Kegiatan			Hasil/Outcome	Ket
				Kualitatif	Kuantitatif			
					Target	Realisasi		
2	3	4	5	6	7	8	9	12
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000.000	1.225.000,00	13.775.000,00	Prosentase pelaksanaan monev tempat makam bertribusi	100%	100%		
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah					86.96%		Persentase rumah tinggal bersanitasi	
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	3.834.750.000,02	3.379.720.000,00	455.030.000,02	Jumlah IPAL Komunal terbangun	9 IPAL	8 IPAL		
Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah	57.123.000	0	57.123.000,00	Jumlah peserta sosialisasi program LLTT	150 peserta	0		
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PAL	943.159.490,32	691.451.299,00	251.708.191,32	Jumlah rumah/bangunan terlayani sedot tinja	100 rumah	50 rumah		
Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					84%		Persentase infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik	
Pembangunan/peningkatan infrastruktur	9.141.071.439,97	2.399.363.820,00	6.741.707.619,97	Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun	7 bangunan	5 bangunan		
Program pembangunan infrastruktur pedesaan					84.49%		Persentase penduduk berakses air minum	
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	24.337.995.752	11.251.643.971,00	13.086.351.781,00	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	28.442,5 m	15.596,99 m		

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Output Kegiatan			Hasil/Outcome	Ket
				Kualitatif	Kuantitatif			
					Target	Realisasi		
2	3	4	5	6	7	8	9	12
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan	1.362.538.230	668.142.000,00	694.396.230,00	Jumlah bangunan tandon jaringan transmisi dan meterisasi HIPAM	7 pkjn	5 pkjn		
Program pembinaan lingkungan sosial					15%		Persentase akses jalan lingkungan saluran air limbah dan air bersih di lingkungan perkotaan	
Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata	730.078.130	0	730.078.130,00	Jumlah Panjang jalan lingkungan	5 lokasi	0		
penyediaan/ pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi dan air bersih	1.300.079.060	835.396.240,00	464.682.820,00	Jumlah Jaringan air bersih dan jumlah IPAL Komunal yang terbangun	4 lokasi	2 lokasi		

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2018, sebagaimana ditetapkan dalam DPA/DPPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu Tahun 2018, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu dialokasikan anggaran sebesar Rp. 57.168.823.483,22 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5.374.348.899,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 51.794.474.584,22 yang terbagi dalam :

- a. Belanja Langsung urusan SKPD sebesar Rp. 1.645.748.500,91 yang terdiri dari 3 Program dan 14 Kegiatan.
- b. Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 50.148.726.083,31 yang dijabarkan dalam 11 Program 26 Kegiatan.

Tabel 3.3. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
I	Belanja Tidak Langsung	5.374.348.899,00	4.179.682.986,00	77	
	- Gaji dan Tunjangan	3.507.510.682,00	2.996.575.034,00	85	
	- Tambahan Penghasilan PNS	1.866.838.217,00	1.183.107.934,00	63	
II	Belanja Langsung	51.794.474.584,22	26.370.165.126,00	50	
	- Belanja Pegawai	1.261.704.800,00	939.233.368,00	74	
	- Belanja Barang & Jasa	15.370.831.049,09	11.337.383.838,00	74	
	- Belanja Modal	35.161.938.735,13	14.093.547.920,22	40	

Realisasi belanja langsung secara rinci per program dan kegiatan ditampilkan pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94.250.000	75.702.240,00	80.32	18.547.760,91	19.68
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	43.295.100	21.109.243,00	48.76	22.185.857,00	51.24
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	985.194.800	756.043.368,00	76.74	229.151.432,00	23.26
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.500.000	55.875.000,00	95.51	2.625.000,00	4.49
	penyediaan alat tulis kantor	66.416.000	40.023.000,00	60.26	26.393.000,00	39.74
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.593.000	35.278.400,00	82.83	7.314.600,00	17.17
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000	1.200.000,00	40	1.800.000,00	60
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.542.000	4.750.050,00	28.72	11.791.950,00	72.28
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.300.000	4.498.000,00	48.37	4.802.000,00	51.63
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.507.600	37.163.850,00	85.42	6.343.750,00	14.58
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	150.000.000	107.638.370,00	71.76	42.361.630,00	28.24
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah	21.000.000	7.787.500,00	37.08	13.212.500,00	62.92
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Pembangunan rumah dinas	50.000.000	48.840.000,00	97.68	1.160.000,00	2.32
	pembangunan gedung kantor	971.564.009	108.636.000,00	11.18	862.928.009,00	88.82
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2.160.000	1.097.600,00	50.81	1.062.400,00	49.19
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	407.112.000	109.714.900,00	26.95	297.397.100,00	73.05

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	87.494.880	24.176.500,00	27.63	63.318.380,00	72.37
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	511.000.000	487.125.500,00	95.33	23.874.500,00	4.67
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	806.620.800	750.381.800,00	93.03	56.239.000,00	6.97
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	30.000.000	24.156.000,00	80.52	5.844.000,00	19.48
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	82.150.000	7.215.000,00	8.78	74.935.000,00	91.22
	Program Pengembangan Perumahan					
	Pengadaan dan pemasangan penomoran rumah dan bangunan	19.150.000	10.053.832,00	52.5	9.096.668,00	47.5
	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.138.929.000	390.927.993,00	34.32	748.001.007,00	65.68
	Program pemberdayaan komunitas perumahan					
	Validasi rumah tidak layak huni	36.095.000	16.279.800,00	45.1	19.815.200,00	54.9
	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan					
	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	30.244.900	0	0	30.244.900,00	100
	Program pengembangan sistem informasi pertanahan					
	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	106.459.842	102.768.700,00	96.53	3.691.142,00	3.47

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7
	Program pengelolaan areal pemakaman					
	Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal	50.000.000	49.252.000,00	98.5	748.000,00	1.5
	koordinasi pengelolaan areal pemakaman	44.055.000	24.225.000,00	54.99	19.830.000,00	45.01
	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	3.326.045.050,00	3.027.303.150,00	91.6	359.094.900,00	8.4
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	840.000.000	814.000.000,00	96.9	26.000.000,00	3.1
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000.000	1.225.000,00	8.17	13.775.000,00	91.83
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah					
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	3.834.750.000,02	3.379.720.000,00	88.13	455.030.000,02	11.87
	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah	57.123.000	0	0	57.123.000,00	100
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana PAL	943.159.490,32	691.451.299,00	73.31	251.708.191,32	26
	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh					
	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	9.141.071.439,97	2.399.363.820,00	26.25	6.741.707.619,97	73.75
	Program pembangunan infrastruktur pedesaan					
	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	24.337.995.752	11.251.643.971,00	46.23	13.086.351.781,00	53.77
	Pembangunan sarana dan prasarana aie bersih pedesaan	1.362.538.230	668.142.000,00	49.04	694.396.230,00	50.96

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7
	Program pembinaan lingkungan sosial					
	Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata	730.078.130	0	0	730.078.130	100
	penyediaan/ pemeliharaan saluran air limbah, samitasi dan air bersih	1.300.079.060	835.396.240,00	41.15	1.194.760.950,00	58.85

BAB IV**PENUTUP****4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja**

Pada umumnya pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan baik terutama yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan fisik infrastruktur kota dan lingkungan permukiman. Pada belanja langsung, sebagaimana Rencana Umum Pengadaan Dinas Perumahan KPP melaksanakan 48 paket pekerjaan dengan Metode Swakelola, 278 paket pekerjaan melalui Penyedia dan 3 paket penyedia dalam swakelola. Secara umum (93,3%) dari total kegiatan belanja langsung yang dilaksanakan telah berhasil dilaksanakan meskipun terdapat kendala-kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Gambaran ringkas pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung

Metode Pelaksanaan	Jumlah Paket	Pelaksanaan Berhasil dengan Baik	Pelaksanaan Terkendala/Gagal
Swakelola	48	47	1
<u>Penyedia :</u>			
- Belanja Jasa Konstruksi	199	187	12
- Belanja Jasa Konsultansi	63	57	6
- Belanja Barang	16	13	3
Penyedia dalam Swakelola	3	3	0
Jumlah	329	307	22

4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif

Kendala dan Permasalahan/hambatan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari aspek internal maupun eksternal meliputi:

a. SDM dan Struktur Organisasi :

Sebagai OPD Teknis, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum didukung oleh pegawai/personil yang memadai untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi kedinasan, meskipun secara kuantitas personil yang ada sudah cukup tetapi secara kualitas masih sangat perlu peningkatan diantaranya adalah kebutuhan staf yang menguasai proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selain kualitas SDM, adanya perubahan/mutasi pengampu jabatan dalam struktur organisasi menjadi peran yang penting dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan. Hal ini karena jabatan pejabat pembuat komitmen kegiatan seringkali melekat dengan jabatan struktural sesuai dengan tugas fungsi yang di ampu.

b. Peraturan Perundangan dan Sistem Tata laksana :

- Berkaitan dengan peraturan perundangan, terbitnya peraturan baru tentang pengadaan barang/jasa (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018) berdampak pada penyesuaian dalam pejabat/personil pelaksana kegiatan termasuk tugas dan kewenangannya. Penyesuaian yang terjadi di pertengahan proses pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kinerja.
- Berkaitan dengan sistem tata laksana pada penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdapat beberapa kewenangan yang tumpang tindih baik kewenangan yang ada pada internal dinas (antar bidang) maupun kewenangan pada pihak eksternal dinas. Hal ini berdampak pada perbedaan interpretasi pada peraturan perundangan (khususnya peraturan tentang pengadaan barang/jasa) juga menjadi salah satu hambatan dalam sistem tata laksana pelaksanaan kegiatan.

c. Anggaran :

Pengelolaan Belanja Langsung sebesar Rp. 51.534.474.584,22 dapat terserap sebesar Rp. 26.370.165.126,00 (51,17%). Pencapaian sebesar ini berkaitan dengan adanya hambatan-hambatan pada SDM maupun sistem tata laksana pada point a dan b.

d. Eksternal organisasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas tidak akan pernah lepas dari pihak eksternal yang berkepentingan maupun masyarakat penerima/sasaran kegiatan. Perencanaan kegiatan seringkali tidak disertai dengan komunikasi efektif dengan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga berpotensi timbulnya penolakan-penolakan sehingga kegiatan terhambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, permasalahan sering terjadi berkaitan dengan pihak penyedia barang/jasa yang kurang kompeten di bidangnya dengan komitmen yang lemah dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga berdampak pada hasil akhir dari penyelesaian pengadaan barang/jasa.

e. Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018, terdapat beberapa kegiatan yang terkendala dalam pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- Pengadaan Barang

Sebagaimana tabel 4.1 terdapat 3 (tiga) belanja barang yang terkendala dalam pelaksanaannya, yaitu belanja publikasi (kalender UPT PALD), pengadaan alat laboratorium (rapid test) UPT PALD dan pengadaan ban truck tangki tinja. Ketiga belanja ini mendukung kinerja pelayanan UPT PALD, namun demikian pelaksanaannya terkendala dengan harga survei yang lebih tinggi dari pagu anggaran yang ditetapkan.

- Pembangunan Pasar Sayur Kota Batu Tahap II

Kegiatan ini merupakan kegiatan pembangunan lanjutan untuk proses penyelesaian pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2017. Kegiatan ini terkendala pada proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan umum, dimana terjadi 2 (dua) kali kegagalan pelelangan pada tahap pembuktian kualifikasi dan untuk

melaksanakan proses pelelangan ulang, estimasi waktu pelaksanaan fisik konstruksi sudah tidak memungkinkan.

- Pembangunan Tandon dan Jaringan Air Bersih

Kegiatan ini merupakan kegiatan pembangunan yang didukung dari dana alokasi khusus APBN yang pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana desa. Berdasarkan peraturan tersebut, penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dibatasi selambatnya tanggal 21 Juli 2018. Pada Tahun 2018, kegiatan pembangunan tandon/jaringan air bersih ini terdapat 4 (empat) paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui pemilihan langsung. Proses pengadaan barang/jasa telah dilakukan melalui Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu. Namun demikian, dipertengahan proses terdapat kendala non teknis berkaitan dengan Pejabat Pembuat Komitmen sehingga proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan. Mengingat dibutuhkan waktu dalam proses pergantian Pejabat Pembuat Komitmen, menyebabkan persyaratan sebagaimana batasan waktu pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak dapat dipenuhi.

- Pembangunan Jalan Pedesaan (Paving)

Terdapat beberapa lokasi pekerjaan pembangunan jalan paving yang tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kurang matangnya perencanaan kegiatan, integrasi perencanaan dengan perangkat daerah lain dengan urusan yang sama serta belum adanya data dasar kondisi jalan lingkungan permukiman di Kota Batu. Permasalahan inilah yang menyebabkan terjadinya overlapping paket pekerjaan dengan dinas lain.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Dari adanya beberapa permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya pemecahan masalah yaitu :

a) Pemecahan masalah SDM

- Permasalahan kualitas SDM menjadi upaya bersama untuk diatasi dengan adanya kegiatan-kegiatan diklat ataupun bimbingan teknis, baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun instansi lain. Upaya-upaya ini dilakukan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur dalam teknis pelaksanaan kegiatan sehingga kinerja organisasi dapat berjalan optimal.

b) Upaya pemecahan masalah pada sistem tata laksana, antara lain :

- Perlu pengkajian ulang terhadap penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan agar selaras dengan tugas dan fungsi dalam internal dinas (antar bidang) maupun eksternal dinas (instansi/dinas lain);
- Pengorganisasian yang terstruktur dengan baik sebagaimana tugas fungsi yang diampu, selaras dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target organisasi;
- Penempatan personil yang tepat/kompeten dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kinerja berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundangan.

c) Pemecahan masalah Anggaran

- Perlu perencanaan yang lebih matang untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya;
- Perlu koordinasi dan sinkronisasi yang lebih matang dalam proses penganggaran pada semua pihak (eksekutif, legislatif dan masyarakat atau pihak desa/kelurahan) sehingga tidak terjadi penganggaran ganda maupun tumpang tindih alokasi anggaran kegiatan

d) Pemecahan masalah eksternal

Untuk mengantisipasi potensi konflik yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan mengatasi kendala non teknis yang terjadi, komunikasi efektif dengan setiap pihak yang terlibat harus dilaksanakan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang praktis dan tidak berdampak luas. Berkaitan

dengan komitmen dan kompetensi penyedia barang/jasa, seharusnya pada tahapan pemilihan penyedia barang/jasa, panitia/pejabat yang bertanggung jawab dapat lebih selektif dalam proses pengadaan barang/jasa.